



# **RENCANA KERJA TAHUN 2018**



**DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

## **KATA PENGANTAR**

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), sehingga merupakan tahun strategis untuk mengawali pembangunan lima tahun kedepan dan merupakan jembatan dari pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 disusun sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan perkebunan di Jawa Timur selama satu tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya Renja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur kemudian diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Diharapkan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Tahun 2018, baik oleh aparat selaku Pembina bidang perkebunan, para pelaku usaha perkebunan maupun berbagai institusi yang terkait dengan pembangunan perkebunan di Jawa Timur.

Surabaya, Oktober 2018

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ir. KARYADI, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19610915 198203 1 012

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016	5
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>27</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Sasaran Renja SKPD	27
3.3 Program dan Kegiatan	28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>40</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan kinerja yang disusun oleh OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan seputar tentang tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, pendanaan, serta pengorganisasian sumber daya dalam mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Tugas dan Fungsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 ini disusun dengan berpedoman kepada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018 yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- 14) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
- 15) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola sumber daya dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan pada sektor perkebunan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

#### **b. Tujuan**

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya dalam mencapai target-target yang telah ditentukan, agar lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Bab ini memuat: Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat: Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2018 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini memuat: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016**

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu Kebijakan/Program/Kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
- b. Indikator keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
- c. Indikator hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

## A. Realisasi Kinerja Tahun Lalu (tahun 2016)

### 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan Persentase (%) capaian peningkatan produksi			
		- (%) Tanaman Semusim	1,35 %	3,14 %	232,59 %
		- (%) Tanaman Tahunan	0,98 %	2,5 %	255,10 %

Dari data tabel realisasi produksi tahun 2016: untuk tanaman semusim realisasi produksi sebesar 1.423.890 ton atau mengalami penurunan 0,32 dari tahun dasar Renstra (realisasi 2014) yaitu sebesar 1.428.487 ton. Tetapi bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015 yang sebesar 1.380.528 ton untuk produksi 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,14 %. Perlu kita jelaskan bahwa Jawa Timur untuk komoditi utama perkebunan tanaman semusim yaitu tanaman tebu dan tembakau. Di tahun 2016 untuk tanaman perkebunan semusim mengalami penurunan mulai dari areal tertanam sampai dengan areal terpanen, dikarenakan

sepanjang tahun 2016 mengalami kemarau basah. Untuk tanaman tebu walaupun bobot tebu terpanen meningkat dari tahun 2015 mencapai produksi sebesar 14.367.469 ton naik di 2016 sebesar 16.249.430 ton namun rendemen tebu mengalami penurunan, dengan produksi gula di tahun 2015 sebesar 1.217.333 ton turun di 2016 dengan produksi gula sebesar 1.035.156 ton, namun masih tertolong dari produksi gula merah tebu rakyat yang meningkat.

Untuk tanaman tembakau, dengan faktor adanya kemarau basah di 2016, di awal on farm sudah banyak terjadi kegagalan tanam di berbagai wilayah Jawa Timur, dari total tertanam di tahun 2016 seluas 71.361 hektar, terpanen seluas 53.011 hektar atau turun sebesar 25,71 %. hal mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap nilai produksi sub sektor perkebunan.

Untuk komoditi tanaman tahunan, realisasi produksi tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,59 % atau sebesar 378.412 ton dari produksi tahun dasar tahun 2014 yaitu sebesar 437.939 ton, namun mengalami kenaikan produksi bila dibandingkan dengan produksi tahun 2015 yaitu sebesar 2,5 % atau 369.179 ton. Adapun komoditi utama Jawa Timur untuk tanaman tahunan yaitu Kopi, Kakao, Cengkeh, Kelapa dan Jambu Mete semua mengalami kenaikan.

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase (%) capaian peningkatan produktivitas			
		- (%) Tebu	0,24 %	0,19 %	79,17 %
		- (%) Tembakau	1,19 %	0,98 %	82,35 %
		- (%) Kopi	4,49 %	4,32 %	96,21 %
		- (%) Kakao	1,38 %	1,30 %	94,20 %
		- (%) Cengkeh	3,61 %	3,46 %	95,84 %
		- (%) Kelapa	0,89 %	0,75 %	84,26 %

Dari data di atas untuk realisasi produktivitas di tahun 2016 semua tidak bisa mencapai target prosentase peningkatan produktivitas, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Namun terhadap produktivitas tahun dasar (2014) semua komoditi utama perkebunan Jawa Timur mengalami kenaikan, hal tersebut tidak lepas dari program kegiatan Dinas Perkebunan yang dilaksanakan di tahun 2016.

Kendala utama tidak optimalnya produktivitas tanaman perkebunan di Jawa Timur tahun 2016 dikarenakan terjadinya kemarau basah, untuk tanaman semusim khususnya tebu dan tembakau yang sangat rentan terjadinya penurunan, walaupun Dinas Perkebunan di tahun 2016 untuk tembakau dilaksanakan intensifikasi seluas 7.000 hektar demikian juga tebu dilaksanakan rawat ratoon seluas 4.550 hektar.

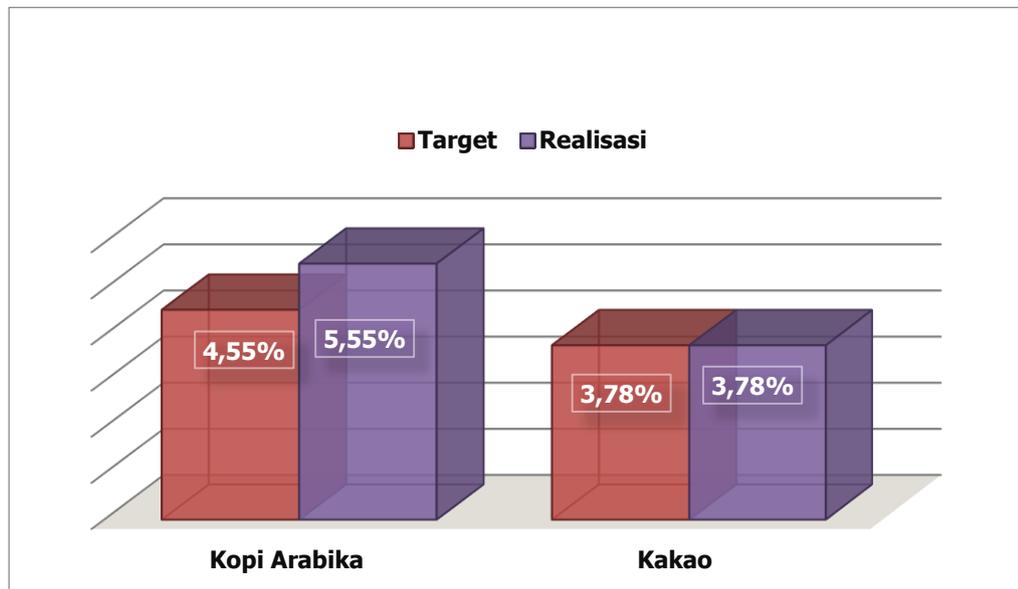
Pengaruh kemarau basah di tanaman tahunan khususnya untuk tanaman kakao dan kopi mempengaruhi di proses pembungaan dan pembentukan buah sehingga sedikit banyak juga mempengaruhi produktivitas per satuan luas areal tanaman kakao dan kopi.

## 2. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya mutu produk perkebunan	Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Persentase (%) capaian peningkatan mutu produk perkebunan			
		Kopi Arabika	4,55 %	5,55 %	121,97 %
		Kakao	3,78 %	3,78 %	100 %

Dari data di atas untuk realisasi peningkatan mutu komoditi Kopi Arabika dan Kakao di tahun 2016 mengalami kenaikan dari

capaian tahun 2015, kegiatan untuk meningkatkan mutu yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2016 dengan bantuan alat pengolahan dan alih teknologi proses penanganannya.



### 3. Program Peningkatan SDM Non Aparatur Perkebunan

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan	Peningkatan SDM Non Aparatur Perkebunan	Prosentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan	2 %	2,1 %	105

Dari data realisasi pemberdayaan petani perkebunan melalui kegiatan 2016 meningkat dari tahun 2015 (n-1) yang ditargetkan mengalami peningkatan kuantitatif jumlah peserta pemberdayaan petani perkebunan (kelompok) dari tahun sebelumnya (n-1) sebesar 5 %. Upaya peningkatan SDM petani perkebunan difasilitasi oleh Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Non PNS yang terbagi menjadi 6 kegiatan, dimana implementasinya berupa kegiatan sekolah lapang agribisnis, pemberdayaan kelembagaan dan alih teknologi penanganan panen dan pasca panen produk perkebunan.

## **B. Realisasi Anggaran Tahun Lalu (Tahun 2016)**

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) tahun 2014-2019 pelaksanaan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 diarahkan untuk mencapai target 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan
2. Meningkatnya nilai tambah hasil produk perkebunan
3. Meningkatnya pemberdayaan petani perkebunan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi

Adapun hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp 3.553.368.601,- atau 102,63% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.462.201.000,- dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.409.753.750,50 terjadi kenaikan sebesar 4.21%.
2. Anggaran belanja daerah Dinas Perkebunan tahun 2016 sebesar Rp. 99.999.160.400,- terealisasi sebesar Rp. 93.894.248.514,- atau 93.90% yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung Rp. 14.368.888.614,- atau 92,08% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 79.525.359.900,- atau 94,23%.

### **Rekapitulasi Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.493.805.200	1.410.528.049	94,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.337.828.800	1.183.879.529	88,49
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	446.342.000	439.123.258	98,38
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.646.128.500	1.498.658.188	91,04
5	Program peningkatan Produksi Perkebunan	62.933.035.500	59.759.398.604	94,96
6	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	11.988.050.000	10.906.024.399	90,97
7	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	4.550.000.000	4.327.747.873	95,12

## Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran OPD		Realisasi	
			K	Rp	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.493.805.200</b>	<b>1.410.528.049</b>	<b>94,43</b>
1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan pelaporan administrasi perkantoran	1 Pkt	1.493.805.200	1.410.528.049	94,43
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1.337.828.800</b>	<b>1.183.879.529</b>	<b>88,49</b>
1.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	1 Pkt	835.580.000	754.986.373	90,35
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Total gedung yang dipelihara	1 Pkt	502.248.800	428.893.156	85,39
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>			446.342.000	439.123.258	98,38
1.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya honorarium kegiatan PNS, dab belanja barang dan jasa	1 Pkt	250.682.000	248.933.958	99,30
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya honorarium kegiatan PNS, dab belanja barang dan jasa	1 Pkt	195.660.000	190.189.300	97,20
<b>IV</b>	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan			<b>1.646.128.500</b>	<b>1.498.658.188</b>	91,04

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran OPD		Realisasi	
			K	Rp	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya honorarium kegiatan PNS, uang lembur serta belanja barang dan jasa	4 Dok	428.253.500	376.082.205	87,82
2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Terlaksananya honorarium kegiatan PNS, uang lembur serta belanja barang dan jasa	2 Dok	524.100.000	496.330.463	94,70
3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Terlaksananya honorarium kegiatan PNS, uang lembur serta belanja barang dan jasa	3 Dok	693.775.000	626.245.520	90,27
<b>V</b>	<b>Program peningkatan Produksi Perkebunan</b>					
1	Pengembangan Tanaman Kakao	Terlaksananya Pengembangan tanaman kakao rakyat	4.000 Ha	7.501.200.000	7.380.097.560	98,39
2	Pengembangan Tanaman Kelapa	Terlaksananya Pengembangan kelapa dalam	100 Ha	625.000.000	595.006.500	95,20
3	Pengembangan Tanaman Kopi Arabika	Terlaksananya Pengembangan kopi arabika	2.000 Ha	4.375.775.000	4.252.338.750	97,18
4	Fasilitasi Pengujian Mutu Benih	Terlaksananya Fasilitasi pembinaan mutu benih tanaman perkebunan	500 Ha	2.150.000.000	1.974.891.205	91,86
5	Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Diversifikasi kopi robusta, kemiri sunan dan lada	15 Ha	135.000.000	104.521.000,	77,42

6	Pengembangan Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani)	Terlaksananya Demplot tumpang sari dan demplot penyangga rendemen tebu	3 Pkt	850.000.000	798.212.700	93,91
No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran OPD		Realisasi	
			K	Rp	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
7	Fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Terlaksananya Fasilitasi GUP perkebunan	1 Pkt	1.500.000.000	1.450.266.491	96,68
8	Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati	Terlaksananya pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati	7 Pkt	150.000.000	136.999.401	91,33
9	Fasilitasi Pengembangan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Kebun benih tebu	48 Ha	5.325.000.000	5.215.675.802	97,95
10	Fasilitasi Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Terlaksananya demplot klon harapan rendemen tinggi	4 Ha	2.450.000.000	2.236.379.971	91,28
11	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan	Terlaksananya penanaman kelapa genjah di lahan pekarangan di kota	38 Ha	13.492.500	6.980.000	51,73
12	Intensifikasi Tanaman Kakao	Terlaksananya pemupukan kebun kakao	100 Ha	520.000.000	480.763.500	92,45
13	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika	Terlaksananya pumupuk kebun kopi arabika	50 Ha	150.000.000	119.150.000	79,43
14	Intensifikasi Cengkeh dan Cabe Jamu	Terlaksananya Pemupukan kebun cengkeh dan penyulaman tanaman cabe jamu	75 Ha	385.000.000	344.932.500	89,59
15	Intensifikasi Tanaman Jambu Mete dan Nilam	Terlaksananya Pemupukan kebun jambu mete dan penyulaman tanaman nilam	50 Ha	80.000.000	77.022.000	96,28

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran OPD		Realisasi	
			K	Rp	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
16	Rehabilitasi Tanaman Kakao	Terlaksananya rehabilitasi tanaman kakao yang sudah tua dan rusak	10 Ha	450.000.000	432.754.750	96,17
17	Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta	Terlaksananya rehabilitasi tanaman kopi robusta yang sudah tua dan rusak dan pemberian pupuk pemeliharaan rehab	50 Ha	700.000.000	638.907.405	91,27
18	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	Terlaksananya rehabilitasi tanaman cengkeh yang sudah tua dan rusak	50 Ha	210.000.000	187.047.500	89,07
19	Rehabilitasi Tanaman Kelapa	Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kelapa	50 Ha	140.000.000	127.219.781	90,87
20	Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan tanaman pangan dan ternak	Terlaksananya Diversifikasi tanaman perkebunan rakyat	5 Ha	125.000.000	114.236.250	91,39
21	Pengembangan Sarana dan Prasarana on farm Pembangunan Perkebunan	Terlaksananya Bantuan alat onfarm, pupuk NPK dan pupuk organik , sarana produksi berupa bibit		1.565.000.000	1.462.504.425	93,45
22	Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan Pupuk dan Pestisida Bidang Perkebunan	Tersusunnya RDKK perkebunan	1 Pkt	238.900.000	233.935.110	97,92

23	Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan	Pengendalian serangan hama penyakit perkebunan per tahun	1 Pkt	1.000.000.000	962.486.220	96,25
24	Fasilitasi pemeliharaan sarana dan Prasarana Produksi Benih	Tersedia sarana dan prasarana produksi benih	1 Pkt	1.100.000.000	1.081.338.500	98,30

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran OPD		Realisasi	
			K	Rp	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
25	Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Sertifikasi benih	Tersedia sarana dan prasarana sertifikasi benih	1 Pkt	1.260.000.000	1.151.628.794	91,40
26	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	Terlaksananya percontohan intensifikasi tembakau	7.000 Ha	25.804.844.000	24.502.524.034	94,95
27	Pengamanan (safeguarding) Pembangunan Perkebunan	Pengawasan Peraturan Daerah dan Rencana strategis Pembangunan Perkebunan	1 Pkt	4.128.824.000	3.691.578.455	89,41
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b>			11.988.050.000	10.906.024.399	90,97
1	Fasilitasi pengembangan agribisnis melalui kemitraan petani dan mitra dagang	Terlaksananya Fasilitasi temu dagang dan kontak bisnis komoditi perkebunan	1 Pkt	134.000.000	121.631.200	90,77
2	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar	Terlaksananya Fasilitasi pembinaan perkebunan besar	1 Pkt	211.000.000	188.148.315	89,17
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana off farm Pembangunan Perkebunan	Terlaksananya bantuan alat-alat off farm	44 Unit	3.040.000.000	2.821.434.100	92,81
4	Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan	Terlaksananya Ketahanan pangan komoditi perkebunan	1 Pkt	47.000.000	28.271.800	60,15
5	Fasilitasi pengawasan dan sertifikasi mutu produk perkebunan	Terlaksananya fasilitasi pengawasan dan sertifikasi mutu produk perkebunan	2 Sertifikat	300.000.000	269.460.070	89,82

6	Fasilitasi Penerapan Teknologi Panen dan Pasca Panen	Terlaksananya bantuan alat pengolahan pasca panen komoditi perkebunan	3 Paket	722.500.000	648.188.105	89,71
7	Fasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah	Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar wilayah	1 Pkt	121.050.000	98.307.584	81,21
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)</b>	<b>Target kinerja dan anggaran OPD</b>		<b>Realisasi</b>	
			<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku	bantuan penanganan panen dan pasca panen tembakau	6.404 Unit	6.480.000.000	5.912.391.830	91,24
9	Fasilitasi promosi produk dan infomasi pasar komoditi perkebunan	Terlaksananya promosi produk perkebunan dalam provinsi dan luar provinsi	6 Kali	932.500.000	818.191.395	87,74
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan</b>			4.550.000.000	4.327.747.873	95,12
1	Pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/ atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau	Terlaksananya pembinaan kelompok	40 Kelompok			
2	Sekolah lapang Agribisnis	Terlaksananya sekolah lapang agribisnis perkebunan	12 Kelompok	450.000.000	417.552.650	92,79
3	Pendidikan masyarakat produktif untuk Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit	Terlaksananya peningkatan kapabilitas pengendalian hama penyakit	7 Kelompok	750.000.000	718.650.540	95,82
4	Pendidikan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan	Terlaksananya Peningkatan usaha tani konservasi petani perkebunan	5 Kelompok	750.000.000	726.218.450	96,83
5	Fasiliasi Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Terlaksananya pertemuan asosiasi perkebunan	6 Kelompok	430.000.000	376.827.753	87,63

6	Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Usaha Perkebunan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani perkebunan	10 Kelompok	170.000.000	165.563.100	97,39
---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------

## **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD**

### **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

No.	Uraian	Dana Program / Kegiatan	Realisasi		Efisien	Efektif
		Rp	Rp	Rp(%)		
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	<b>62.933.035.500</b>	<b>59.759.398.604</b>	<b>94,96%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Pengembangan Tanaman Kakao	7.501.200.000,00	7.380.097.560	98,39	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	Pengembangan Tanaman Kelapa	625.000.000,00	595.006.500	95,20	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	Pengembangan Tanaman Kopi Arabika	4.375.775.000,00	4.252.338.750	97,18	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4	Fasilitasi Pengujian Mutu Benih	2.150.000.000,00	1.974.891.205	91,86	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	Diversifikasi Tanaman Perkebunan	135.000.000,00	104.521.000	77,42	<b>100%</b>	<b>100%</b>
6	Pengembangan Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani)	850.000.000,00	798.212.700	93,91	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	Fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	1.500.000.000,00	1.450.266.491	96,68	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8	Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati	150.000.000,00	136.999.401	91,33	<b>100%</b>	<b>100%</b>
9	Fasilitasi Pengembangan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan	5.325.000.000,00	5.215.675.802	97,95	<b>100%</b>	<b>100%</b>
10	Fasilitasi Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	2.450.000.000,00	2.236.379.971	91,28	<b>100%</b>	<b>100%</b>
11	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan	13.492.500,00	6.980.000	51,73	<b>100%</b>	<b>100%</b>
12	Intensifikasi Tanaman Kakao	520.000.000,00	480.763.500	92,45	<b>100%</b>	<b>100%</b>
13	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika	150.000.000,00	119.150.000	79,43	<b>100%</b>	<b>100%</b>
14	Intensifikasi Cengkeh dan Cabe Jamu	385.000.000,00	344.932.500	89,59	<b>100%</b>	<b>100%</b>
15	Intensifikasi Tanaman Jambu Mete dan Nilam	80.000.000,00	77.022.000	96,28	<b>100%</b>	<b>100%</b>
16	Rehabilitasi Tanaman Kakao	450.000.000,00	432.754.750	96,17	<b>100%</b>	<b>100%</b>
17	Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta	700.000.000,00	638.907.405	91,27	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No.	Uraian	Dana Program / Kegiatan	Realisasi		Efisien	Efektif
18	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	210.000.000,00	187.047.500	89,07	100%	100%
19	Rehabilitasi Tanaman Kelapa	140.000.000,00	127.219.781	90,87	100%	100%
20	Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan tanaman pangan dan ternak	125.000.000,00	114.236.250	91,39	100%	100%
21	Pengembangan Sarana dan Prasarana on farm Pembangunan Perkebunan	1.565.000.000,00	1.462.504.425	93,45	100%	100%
22	Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan Pupuk dan Pesticida Bidang Perkebunan	238.900.000,00	233.935.110	97,92	100%	100%
23	Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan	1.000.000.000,00	962.486.220	96,25	100%	100%
24	Fasilitasi pemeliharaan sarana dan Prasarana Produksi Benih	1.100.000.000,00	1.081.338.500	98,30	100%	100%
25	Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Sertifikasi benih	1.260.000.000,00	1.151.628.794	91,40	100%	100%
26	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	25.804.844.000	24.502.524.034	94,95	100%	100%
27	Pengamanan (safeguarding) Pembangunan Perkebunan	4.128.824.000,00	3.691.578.455	89,41	100%	100%
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b>	<b>11.988.050.000</b>	<b>10.906.024.399</b>	<b>90,97</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Fasilitasi pengembangan agribisnis melalui kemitraan petani dan mitra dagang	134.000.000	121.631.200	90,77	100%	100%
2	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar	211.000.000	188.148.315	89,17	100%	100%
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana off farm Pembangunan Perkebunan	3.040.000.000	2.821.434.100	92,81	100%	100%
4	Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan	47.000.000	28.271.800	60,15	100%	100%
5	Fasilitasi pengawasan dan sertifikasi mutu produk perkebunan	300.000.000	269.460.070	89,82	100%	100%
6	Fasilitasi Penerapan Teknologi Panen dan Pasca Panen	722.500.000	648.188.105	89,71	100%	100%
7	Fasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah	121.050.000	98.307.584	81,21	100%	100%

8	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku	6.480.000.000	5.912.391.830	91,24	100%	100%
9	Fasilitasi promosi produk dan informasi pasar komoditi perkebunan	932.500.000	818.191.395	87,74	100%	100%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan</b>	<b>4.550.000.000</b>	<b>4.327.747.873</b>	<b>95,12</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/ atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau	2.000.000.000	1.922.935.380	96,15	100%	100%
2	Sekolah lapang Agribisnis	450.000.000	417.552.650	92,79	100%	100%
3	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit	750.000.000	718.650.540	95,82	100%	100%
4	Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan	750.000.000	726.218.450	96,83	100%	100%
5	Fasiliasi Penguatan Kelembagaan Perkebunan	430.000.000	376.827.753	87,63	100%	100%
6	Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Usaha Perkebunan	170.000.000	165.563.100	97,39	100%	100%
<b>IV</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.493.805.200</b>	<b>1.410.528.049</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.493.805.200	1.410.528.049	94,43	100%	100%
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.337.828.800</b>	<b>1.183.879.529</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	835.580.000	754.986.373	90,35	100%	100%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	502.248.800	428.893.156	85,39	100%	100%
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>446.342.000</b>	<b>439.123.258</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	250.682.000	248.933.958	99,30	100%	100%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	195.660.000	190.189.300	97,20	100%	100%

<b>VI</b>	<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>1.646.128.500</b>	<b>1.498.658.188</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	428.253.500	376.082.205	87,82	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	524.100.000	496.330.463	94,70	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	693.775.000	626.245.520	90,27	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **C. Isu-isu Strategis Pembangunan Perkebunan**

Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pengaruh issue – issue strategis yang ada, baik lingkungan internal yaitu pada tingkat regional Jawa Timur maupun lingkungan eksternal yaitu pada tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat internasional. Pada tingkat regional, lingkungan strategis yang dominan mempengaruhi perubahan pembangunan perkebunan meliputi kelangkaan dan degradasi kualitas Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan IPTEK dan permintaan terhadap energi terbarukan serta permintaan terhadap produk organik.

Kondisi Sub Sektor Perkebunan saat ini yang menjadi dasar prioritas pembangunan perkebunan, terdapat 6 isu strategis, yaitu: i) Produktivitas dan mutu yang masih rendah; ii) Semakin terbatasnya lahan yang subur untuk budidaya perkebunan; iii) Rendahnya bahan organik tanah; iv) Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan; v) Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi perkebunan; dan vi) Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan.

### **1. Produktivitas dan mutu yang masih rendah**

Produktivitas tanaman perkebunan, yaitu produksi yang dicapai per satuan luas, masih di bawah standar yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal terkait dengan aspek budidaya, yaitu penggunaan benih/bibit yang tidak unggul dan bermutu, cara penanaman yang belum sesuai teknologi dan pemeliharaan tanaman yang belum intensif, serta belum adanya teknologi yang efektif jika terjadi anomali cuaca. Selain produktivitas, mutu produk yang dihasilkan oleh petani juga masih di bawah standar atau belum sesuai dengan permintaan konsumen, karena masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil yang baik.

### **2. Semakin terbatasnya lahan yang subur untuk budidaya perkebunan.**

Pada awalnya sentra pengembangan komoditi perkebunan pada lokasi lahan yang subur, yang sering dikenal sebagai lahan historis pengembangan komoditi perkebunan. Namun seiring dengan kebutuhan pangan, khususnya beras yang makin besar, maka pemerintah mengambil kebijakan lahan-lahan subur tersebut lebih diprioritaskan untuk tanaman pangan (padi). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan tanaman perkebunan bergeser dengan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan-lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal, lahan marginal dan lahan tidur yang secara teknis masih memenuhi persyaratan untuk dikembangkan komoditi perkebunan.

### **3. Rendahnya bahan organik tanah**

Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman adalah sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah. Sifat kimia tanah meliputi kadar

unsur hara dalam tanah, baik makro maupun mikro, kejenuhan basah, kapasitas pertukaran kation, pH dan kadar bahan organik tanah. Kadar bahan organik tanah sebenarnya relatif lebih mudah untuk diperbaiki dengan teknologi yang ada, antara lain dengan menambahkan bahan organik atau pupuk organik ke dalam tanah. Namun kenyataannya, kondisi saat ini bahan organik tanah di Jawa Timur sangat rendah, rata-rata kurang dari 2 %, bahkan ada yang kurang dari 1 %. Sementara tanaman perkebunan membutuhkan tanah berkadar bahan organik tinggi yaitu diatas 3 %. Kadar bahan organik yang tinggi, akan memperbaiki struktur tanah, biologi tanah dan juga kemampuan absorpsi hara maupun daya simpan lengas tanah. Tingginya kemampuan absorpsi berarti daya pegang tanah terhadap unsur-unsur hara tinggi dan selanjutnya melepaskannya untuk diserap akar tanaman.

#### **4. Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan**

Dalam rangka peningkatan produksi dan mutu (nilai tambah) produk perkebunan, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk peningkatan produksi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, antara lain jalan produksi, alat pengolah tanah, alat pemutus akar, alat pemeliharaan tanaman, alat pengendali hama penyakit dan lain-lain. Sementara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka peningkatan nilai tambah, antara lain: alat panen, alat pengolahan hasil, dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang dimiliki petani pada saat ini masih sangat kurang, sementara kemampuan petani untuk mengadakan secara swadaya masih belum mampu sepenuhnya. Terlebih saat ini, minat tenaga kerja muda di pedesaan untuk berkerja di sektor pertanian sangat kecil, mereka lebih senang bekerja di sektor industri, sehingga

di pedesaan mulai kekurangan tenaga kerja yang mau bekerja di lahan/sawah. Oleh karena itu, peralatan pertanian modern (traktor, alat tebang muat, dan lain-lain) sudah sangat dibutuhkan.

#### **5. Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi perkebunan**

Pengendalian hama/penyakit dan upaya menekan gangguan usaha komoditi perkebunan, tidak dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, tetapi untuk memperkecil kehilangan produksi, karena serangan hama penyakit tanaman dan adanya gangguan usaha, berpotensi untuk mengurangi produktivitas, sehingga perlu dikendalikan. Pada saat ini, beberapa jenis hama dan penyakit, masih menyerang tanaman perkebunan dengan intensitas tinggi, antara lain: Hama kwang wung (*Oryctes rhinoceros*) pada Kelapa, yang banyak mengakibatkan kematian tanaman dan dapat memicu potensi kehilangan produksi hingga 26 %; hama penggerek buah (*Conomorpha cramerella*), penyakit busuk buah (*Phytophthora sp*), kepik buah (*Helopeltis sp*) pada Kakao yang dapat menyebabkan potensi kehilangan produksi hingga 10 - 30 %, Penggerek buah Kopi (*Hypotenemus hampai*) yang berpotensi menghilangkan produksi hingga 20 %.

#### **6. Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan**

Di Jawa Timur, telah berkembang kelembagaan petani dengan cukup banyak, baik dalam bentuk Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi berbasis komoditi perkebunan, antara lain Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), Koperasi Petani Kopi, Kakao, Kapas dan asosiasi petani berbasis

komoditi perkebunan, antara lain APTR (Asosiasi Petani Tebu Rayat), APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia), Asosiasi Petani Cengkeh, Kopi, Kakao dan lain-lain. Ada kelembagaan petani perkebunan yang sudah memiliki akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan dengan baik, tetapi sebagian besar masih perlu untuk ditingkatkan kemampuannya. Harapan kita, kelembagaan petani perkebunan mampu menjadi agen pembangunan perkebunan yang dapat mengakses berbagai aspek teknologi modern dan pasar yang berkembang sangat dinamis. Pada saat ini, sudah ada kelompok tani atau Gapoktan yang telah melakukan kemitraan dengan eksportir, dan menghasilkan produk dengan kualitas ekspor, sehingga petani anggotanya dapat menikmati harga produk yang dihasilkan dengan standar harga konsumen dalam negeri. Pada kondisi demikian, maka petani akan dapat menikmati nilai tambah dari usaha taninya dengan nilai yang sepadan dengan resiko yang ada.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **A. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi." Dengan indikator tujuan "Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB"

#### **B. Sasaran**

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2019 adalah :

##### **1. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan;**

Sasaran meningkatnya produksi tanaman perkebunan dengan indikator Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan didukung oleh 3 program, 2 program utama dan 1 program pendukung. 2 program utama yakni Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim perkebunan yang menjadi tanggung jawab Bidang Tanaman Semusim dan Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab Bidang Tanaman Tahunan. Sedangkan program pendukungnya adalah Program Perlindungan tanaman perkebunan yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Perlindungan Perkebunan.

2. Meningkatnya ketersediaan benih tanaman perkebunan bersertifikat;

Sasaran meningkatnya ketersediaan benih tanaman perkebunan bersertifikat, dengan indikator Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan yang bersertifikat, didukung oleh 2 program utama, yakni Program Pengembangan benih tanaman perkebunan yang menjadi tanggung jawab dari Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan (UPT PBPTP) dan Program Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan yang menjadi tanggung jawab dari Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (UPT P2MBTP).

3. Meningkatnya kapasitas sektor hilir perkebunan

Sasaran meningkatnya kapasitas sektor hilir perkebunan, dengan indikator Persentase peningkatan sektor hilir agroindustri perkebunan, didukung oleh Program Bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang menjadi tanggung jawab Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

### **C. Program**

#### **1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Perkebunan**

Program peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Semusim Perkebunan (Bidang Tanaman Semusim) dengan indikator Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan merupakan wadah kegiatan *on farm* tanaman semusim perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim perkebunan melalui Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Diversifikasi dengan pola penyediaan bahan tanaman yang unggul dan bersertifikat serta penerapan teknologi budidaya secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya secara optimal.

Adapun garis besar kegiatan dari Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Perkebunan meliputi:

1. Ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim perkebunan;
2. Sarana dan prasarana *on farm* tanaman semusim perkebunan;

3. Penerapan teknologi budidaya tanaman semusim perkebunan; dan
4. Penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman semusim perkebunan.

Dari garis besar kegiatan di atas kemudian dikejawantahkan ke dalam berbagai macam kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Standarisasi kualitas bahan baku (Seksi Tanaman Tembakau);

Kegiatan dengan indikator jumlah luas intensifikasi Tembakau ini diarahkan kepada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Tembakau dengan pendekatan intensifikasi untuk lahan seluas 7.000 (Tujuh Ribu) hektar. Selain itu, kegiatan ini diarahkan juga kepada meningkatnya pengetahuan petani Tembakau tentang budidaya tanaman Tembakau dengan cara Demplot budidaya tanaman Tembakau yang sesuai dengan *Good Agricultural Practices* (GAP);

2. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku (Seksi Tanaman Tembakau);

Kegiatan dengan indikator jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Tembakau ini diarahkan kepada penanganan panen dan pasca panen tanaman Tembakau melalui distribusi bantuan alat panen dan pasca panen serta pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen tanaman Tembakau sebanyak 1.800 (Seribu Delapan Ratus) unit;

3. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Tebu (Seksi Tanaman Tebu);

Kegiatan ini memiliki 2 (Dua) indikator yakni; jumlah luas pengawalan dan pendampingan pengembangan tanaman Tebu dan jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Tebu. Kegiatan ini diarahkan kepada pengawalan dan pendampingan pengembangan tanaman Tebu di seluruh wilayah Jawa Timur seluas 1.000 (Seribu) hektar dan bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Tebu sebanyak 2 unit;

4. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Semusim lainnya (Seksi Tanaman Semusim Lainnya).

Kegiatan ini memiliki 2 (Dua) indikator yakni; jumlah luas pengembangan tanaman semusim lainnya dan jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya. Kegiatan ini diarahkan kepada peningkatan produksi tanaman semusim lainnya (Wijen dan Nilam) dengan pendekatan ekstensifikasi seluas 6 (Enam) hektar serta pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya dengan penyaluran bantuan alat sebanyak 1 (Satu) unit.

## **2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan**

Program peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan (Bidang Tanaman Tahunan) dengan indikator Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan merupakan wadah kegiatan *on farm* Tanaman Tahunan perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Tahunan perkebunan melalui Ekstensifikasi, Intensifikasi, Peremajaan, Rehabilitasi dan Diversifikasi dengan pola penyediaan bahan tanaman yang unggul dan bersertifikat serta penerapan teknologi budidaya secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya secara optimal.

Adapun garis besar kegiatan dari Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan meliputi:

1. Ekstensifikasi, intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman tahunan perkebunan;
2. Sarana dan prasarana *on farm* tanaman tahunan perkebunan;
3. Penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan perkebunan; dan
4. Penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman tahunan perkebunan

Dari garis besar kegiatan di atas kemudian dikejawantahkan ke dalam berbagai macam kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi (Seksi Tanaman Kopi);  
Kegiatan ini memiliki 4 (Empat) indikator: a). Jumlah luas tertanam bibit Kopi Arabika; b). Jumlah luas pemupukan tanaman Kopi; c). Jumlah luas rehabilitasi tanaman Kopi rakyat; dan d). Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Kopi. Oleh karena perubahan orientasi pembangunan perkebunan yang digagas oleh Bapak Gubernur, dari pembangunan perkebunan berbasis hulu kepada pembangunan perkebunan berbasis hilir, maka untuk tahun 2018, kegiatan pengembangan ditiadakan, sehingga kegiatan ini diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Kopi dengan pendekatan intensifikasi berupa penyaluran bantuan pupuk untuk lahan seluas 200 (Dua ratus) hektar serta diarahkan kepada pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen tanaman Kopi berupa penyaluran bantuan alat sebanyak 43 (Empat puluh tiga) unit;
2. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi di kawasan agropolitan (Seksi Tanaman Kopi);  
Kegiatan dengan indikator jumlah luas tertanam bibit Kopi di kawasan Agropolitan ini diarahkan kepada peningkatan produksi tanaman Kopi di kawasan Agropolitan dalam bentuk optimalisasi lahan dengan menambah populasi tanaman tanpa mengesampingkan faktor-faktor teknis budidaya di lahan seluas 10 hektar;
3. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kakao (Seksi Tanaman Kakao);  
Kegiatan ini memiliki 4 (Empat) indikator: a). Jumlah luas tertanam bibit Kakao; b). Jumlah luas pemupukan tanaman Kakao; c). Jumlah luas rehabilitasi tanaman Kakao rakyat; dan d). Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Kakao. Oleh karena perubahan orientasi pembangunan perkebunan yang digagas oleh Bapak Gubernur, dari pembangunan perkebunan berbasis hulu kepada pembangunan perkebunan berbasis hilir, maka untuk tahun 2018 kegiatan pengembangan ditiadakan, sehingga diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Kakao dengan pendekatan intensifikasi berupa penyaluran bantuan pupuk untuk lahan seluas 100 (Seratus) hektar, serta

diarahkan kepada pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen tanaman Kakao berupa penyaluran bantuan alat panen dan pasca panen Kakao untuk lahan seluas 37 hektar;

4. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Tahunan lainnya (Seksi Tanaman Tahunan Lainnya).

Kegiatan ini memiliki 7 (Tujuh) indikator: a). Jumlah luas pengembangan tanaman Kelapa; b). Jumlah luas rehabilitasi tanaman Cengkeh rakyat; c). Jumlah luas rehabilitasi tanaman Kelapa rakyat; d). Jumlah luas pemupukan tanaman Cengkeh; e). Jumlah luas pemupukan tanaman Kelapa rakyat; f). Jumlah luas pemupukan Jambu Mete; g). Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman tahunan lainnya. Oleh karena adanya keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas pembangunan perkebunan, maka untuk tahun 2018, kegiatan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan produksi tanaman tahunan lainnya (Kelapa) dengan menambah populasi tanaman pada lahan existing seluas 125 hektar.

### **3. Program Perlindungan Tanaman Perkebunan**

Program perlindungan tanaman perkebunan (Bidang Perlindungan Perkebunan) dengan indikator Persentase peningkatan pengamanan nilai produksi, dimaksudkan untuk mengurangi potensi kehilangan produk perkebunan akibat dari serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan melalui upaya pengamatan dan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan serta melalui konservasi lahan komoditi perkebunan. Sehingga diharapkan potensi kehilangan akan dapat diminimalisir secara lebih optimal.

Adapun garis besar kegiatan dari Program Perlindungan Tanaman Perkebunan meliputi:

1. Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
2. Sarana dan prasarana perlindungan tanaman perkebunan;
3. Usaha tani konservasi komoditi perkebunan.

Dari garis besar kegiatan di atas kemudian dikejewantahkan ke dalam berbagai macam kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan

fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan (Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan); Kegiatan dengan indikator jumlah luas pengendalian OPT perkebunan ini diarahkan kepada upaya untuk menekan angka kehilangan akibat dari serangan hama dan penyakit tumbuhan dengan melakukan pengamatan dan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan pada lahan seluas 117 hektar;
2. Usaha tani konservasi komoditi Perkebunan (Seksi Konservasi); Kegiatan dengan indikator jumlah luas konservasi lahan perkebunan ini diarahkan kepada pemanfaatan lahan marginal yang rawan terhadap bencana alam (tanah longsor) untuk diubah menjadi lahan produktif melalui budidaya tanaman perkebunan sesuai dengan spesifik lokasi seluas 37 hektar;
3. Sarana dan Prasarana perlindungan tanaman perkebunan (Seksi Sarana dan Prasarana). Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator, yakni: a). Jumlah sarana prasarana pengendalian OPT; b). Jumlah sarana prasarana konservasi; c). Jumlah pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati pengendalian OPT. Kegiatan ini diarahkan kepada upaya untuk pemenuhan sarana prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk lahan seluas 117 hektar dan pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati pengendalian OPT untuk lahan seluas 37 hektar.

#### **4. Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Program bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil) dengan indikator Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan, merupakan langkah yang harus diambil dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani perkebunan melalui perlakuan yang diberikan terhadap produk perkebunan yang dihasilkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pengolahan produk perkebunan, sehingga didapatkan margin nilai produksi antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Margin yang didapatkan tersebut adalah nilai tambah produk

perkebunan yang berbanding lurus terhadap peningkatan taraf hidup petani perkebunan. Disamping itu, upaya peningkatan nilai tambah produk perkebunan juga ditempuh dengan cara meningkatkan mutu produk perkebunan, sehingga produk perkebunan yang dihasilkan oleh petani perkebunan mempunyai daya saing yang memadai ketika dilepas di pasaran, baik pasar domestik maupun pasar internasional.

Adapun garis besar kegiatan dari Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan meliputi:

1. Peningkatan mutu produk, melalui penerapan teknologi budidaya yang baik dan penanganan pasca panen (GAP dan GHP)
2. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan
3. Fasilitasi terhadap terbentuknya perlindungan kawasan komoditi yang memiliki kekhasan tertentu, untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis (IG)
4. Fasilitasi, advokasi dan bimbingan memperoleh kemudahan akses pengolahan hasil perkebunan;
5. Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha;
6. Mendorong pengembangan aneka produk (products development) perkebunan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah;
7. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usaha secara berkelanjutan;
8. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya dalam memperkuat dan mempertanggung jawab usaha taninya;
9. Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.
10. Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan memperoleh dan menyebarkan informasi mengenai peluang usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat petani dan masyarakat;

11. Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha;
12. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait;
13. Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas perkebunan yang tumbuh dari bawah;
14. Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Dari garis besar kegiatan di atas kemudian dikejawantahkan ke dalam berbagai macam kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan (Seksi Pengolahan Hasil); Kegiatan ini diarahkan kepada upaya untuk memberikan pendampingan kepada petani perkebunan dalam rangka uji sertifikasi terhadap produk perkebunan yang dihasilkan agar lebih mempunyai daya saing ketika dilepaskan di pasaran;
2. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan <Supporting tim APP Provinsi> (Seksi Pengolahan Hasil); Kegiatan ini lebih kepada pemberian dukungan kegiatan terhadap tim APP yang dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur;
3. Pembinaan kemitraan, promosi produk, dan usaha perkebunan besar (Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran); Kegiatan ini diarahkan kepada upaya yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi petani perkebunan dan para pelaku usaha produk perkebunan untuk menjalin kemitraan, serta memfasilitasi petani perkebunan untuk mempromosikan produk perkebunan yang dihasilkan dalam berbagai ajang promosi;

4. Pembinaan kelembagaan petani perkebunan (Seksi Kelembagaan).

Kegiatan ini diarahkan kepada pembinaan terhadap kelompok tani perkebunan dalam hal tata kelola kelembagaan, sehingga tercipta tata kelola kelompok tani secara lebih profesional.

## **5. Program Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan**

Program pengembangan benih tanaman perkebunan (UPT PBPTP) dengan indikator Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan, dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan benih unggul tanaman perkebunan, baik untuk kebutuhan benih tanaman semusim maupun tanaman tahunan dengan cara mengoptimalkan pengembangan kebun benih.

Adapun garis besar kegiatan dari Program Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan meliputi:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan benih tanaman perkebunan;
2. Pengembangan kebun benih tanaman perkebunan.

Dari garis besar kegiatan di atas kemudian dikejawantahkan ke dalam berbagai macam kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Produksi benih perkebunan (Seksi Produksi);  
Kegiatan dengan indikator jumlah luas pengembangan kebun benih ini diarahkan kepada pengembangan kebun benih tanaman semusim
2. Sarana dan Prasarana Pengembangan Benih dan distribusi (Seksi Sarana dan Distribusi);
3. Pelayanan UPT PBPTP (Subbag TU).

## **6. Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih**

Program pengawasan dan pengujian mutu benih (UPT P2MBTP) dengan indikator Persentase peningkatan penanganan sertifikasi benih tanaman perkebunan, merupakan langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan mutu benih tanaman perkebunan dengan cara melakukan uji lapangan dan uji laboratorium terhadap benih yang akan disertifikasi, serta melakukan pengawasan terhadap peredaran benih yang telah disertifikasi.

Adapun garis besar kegiatan dari Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih meliputi:

1. Uji lapangan dan uji laboratorium benih tanaman perkebunan;
2. Sertifikasi benih tanaman perkebunan;
3. Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.

Dari garis besar kegiatan di atas kemudian dikejawantahkan ke dalam berbagai macam kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan Teknis pengawasan dan pengujian mutu benih (Seksi Pelayanan Teknis);
2. Sarana dan Prasarana Pengawasan dan pengujian mutu benih (Seksi Sarana dan Prasarana);
3. Pelayanan UPT P2MBTP (Subbag TU).

## Matriks RENJA 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator (Outcome/Output)	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Kelompok Sasaran	SOTK Pelaksana (Eselon III/IV) sesuai Pergub 54 Thn. 2016															
							Target	Rp.																	
							<b>Pagu Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur</b>	<b>63.557.198.000,00</b>																	
Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan	2,64	Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman semusim	1,48	30.600.000.000,00	Kelompok petani Tembakau di Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pamekasan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung	Bidang Tanaman Semusim															
											Standarisasi kualitas bahan baku	Jumlah luas intensifikasi tembakau (Ha)	7.000	26.500.000.000,00											
											Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tembakau (bh/unit/pkt)	1.800	2.500.000.000,00											
											Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Tebu	Jumlah luas pengawalan dan pendampingan pengembangan tanaman Tebu (Ha)	4.350	1.300.000.000,00											
												Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tebu (bh/unit/pkt)	2												
											Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Semusim lainnya	Jumlah luas Pengembangan tanaman semusim lainnya (Ha)	6	300.000.000,00											
												Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya (bh/unit/pkt)	1												
											Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan	2,64	Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan	1,16	11.800.000.000,00	Kelompok petani Kopi di Kabupaten Gresik Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Situbondo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Mawar	Bidang Tanaman Tahunan				
																						Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi	Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika (ha)	-	6.000.000.000,00
																							Jumlah luas pemupukan tanaman Kopi (Ha)	160	
	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kopi rakyat (Ha)	-																							
	Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen kopi (bh/unit/pkt)	41																							
Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi di kawasan agropolitan	Jumlah luas tertanam bibit kopi di kawasan agropolitan (Ha)	10	300.000.000,00																						
Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kakao	Jumlah luas tertanam bibit kakao (Ha)	-	3.561.347.000,00																						
	Jumlah luas pemupukan tanaman Kakao (Ha)	100																							
	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kakao rakyat (Ha)	-																							
	Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Kakao (bh/unit/pkt)	34																							
Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan	2,64	Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan	1,16	1.938.653.000,00	Kelompok petani tanaman Kelapa di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Kediri Kabupaten Lumajang Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Ngawi Kabupaten Probolinggo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Madiun Kabupaten Mojokerto	Bidang Tanaman Tahunan Lainnya															
											Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman tahunan lainnya	Jumlah luas pengembangan tanaman Kelapa (Ha)	200												
												Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat	150												
												Jumlah luas rehabilitasi tanaman kelapa rakyat	-												
												Jumlah luas pemupukan tanaman cengkeh	75												
												Jumlah luas pemupukan tanaman kelapa rakyat	-												
												Jumlah luas pemupukan jambu mete	45												
												Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman tahunan lainnya (bh/unit/pkt)	-												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator (Outcome/Output)	Target Kinerja dan Pagu Anggaran	Kelompok Sasaran	SOTK Pelaksana (Eselon III/IV)	
Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan	2,64	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan pengamanan nilai produksi	18,00 3.061.347.000,00		Bidang Perlindungan Perkebunan	
					Sarana dan Prasarana perlindungan tanaman perkebunan	Jumlah sarana prasarana pengendalian OPT (Ha) Jumlah sarana prasarana konservasi Jumlah pengembangan agensi hayati dan pestisida nabati pengendalian OPT (Ha)	115 35 -	1.500.000.000,00	Kabupaten Jombang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Probolinggo	Seksi Sarana dan Prasarana
					Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Jumlah luas pengendalian OPT Perkebunan (Ha)	115	1.000.000.000,00	Kabupaten Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kabupaten Jombang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Lamongan, Kab. Jember	Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
					Usaha tani konservasi komoditi Perkebunan	Jumlah luas konservasi lahan perkebunan (Ha)	35	561.347.000,00	Kabupaten Kediri, Kab. Malang, Kab. Probolinggo	Seksi Konservasi
Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	MENINGKATNYA KAPASITAS SEKTOR HILIR PERKEBUNAN	Persentase Peningkatan Sektor Hilir Agroindustri Perkebunan	1,5	Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	8 3.900.000.000,00		Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil	
					Pembinaan mitra, promosi produk, dan pembinaan usaha perkebunan besar	Jumlah mitra petani dan mitra dagang Jumlah promosi produk perkebunan Jumlah kebun yang dilakukan pembinaan	- 6 125	2.000.000.000,00	Kelompok petani perkebunan yang telah menerapkan teknologi budidaya dan teknologi pengolahan hasil di Jawa Timur	Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran
					1. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan (Supporting tim APP Provinsi)	Jumlah kelompok yang tertangani APP bidang perkebunan	5	400.000.000,00	Kabupaten Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan, Kab. Madiun	Seksi Pengolahan Hasil
					2. Pengawasan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan	Jumlah sertifikasi mutu produk perkebunan	4	1.000.000.000,00	Kabupaten Situbondo, Kab. Mojokerto, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Malang	
					Pembinaan kelembagaan petani perkebunan	Jumlah peningkatan kelas kelompok petani perkebunan Jumlah dokumen Rencana Definifit Kebutuhan Kelompok perkebunan Jumlah kelompok sekolah lapang Agribisnis	10 - 6	500.000.000,00	Kabupaten Situbondo, Kab. Mojokerto, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Malang	Seksi Kelembagaan
Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN BERSERTIFIKAT	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan yang bersertifikat	45	Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan penanganan sertifikasi benih tanaman perkebunan	7 3.500.000.000,00		UPT P2MBTP	
					Sarana dan Prasarana Pengawasan dan pengujian mutu benih	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (%)	100	700.000.000,00	Lokasi sebaran benih yang akan dan yang telah disertifikasi di Jawa timur	Seksi Sarana dan Prasarana
					Pelayanan Teknis pengawasan dan pengujian mutu benih	Jumlah sertifikasi benih tanaman perkebunan melalui uji laboratorium dan uji lapang (lembar) Jumlah sertifikat rekomendasi izin produsen benih tanaman perkebunan (lembar) Persentase pengawasan peredaran benih (%)	567 - -	2.000.000.000,00	Lokasi sebaran benih yang akan dan yang telah disertifikasi di Jawa timur	Seksi Pelayanan Teknis
					Pelayanan UPT P2MBTP	IKM	100	800.000.000,00	Pegawai UPT P2MBTP	Subbag TU
					Program Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Benih Tanaman Perkebunan	2,20 5.700.000.000,00		UPT PBPTP	
					Sarana dan Prasarana Pengembangan Benih dan Distribusi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan benih tanaman perkebunan	100	4.200.000.000,00	Lokasi lahan pengembangan kebun benih	Seksi Sarana dan distribusi
					Produksi benih perkebunan	Jumlah luas pengembangan kebun benih perkebunan (tanaman semusim) Jumlah luas pengembangan kebun benih perkebunan (tanaman tahunan)	40 11,70	1.000.000.000,00	Kebun pengembangan benih	Seksi Produksi
					Pelayanan UPT PBPTP	IKM	100	500.000.000,00	Pegawai UPT PBPTP	Subbag TU

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2018. Pengelolaan Sumber Daya merupakan faktor penting terhadap terlaksana dan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut meliputi: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Pengorganisasian, Ketatalaksanaan, serta komitmen yang kuat dari pimpinan. Berhasil tidaknya capaian target yang telah dicanangkan di dalam Renja, akan sangat menentukan terhadap capaian target di dalam Renstra 2014-2019.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini juga menjadi acuan bagi keseluruhan kesatuan tugas dan fungsi Dinas yang terdistribusikan ke tingkat eselon III maupun eselon IV dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah ditargetkan. Sehingga dibutuhkan sinergitas antar berbagai lini untuk secara bersama-sama berkomitmen penuh untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang termaktub di dalam Renja ini secara kredibel dan bertanggung jawab.

Surabaya, Agustus 2017

**Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur**